

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, KOMPETENSI, DAN PARTISIPAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

Putri Nurhaliza

putrinurhaliza2323@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines the effect of transparency, accountability, competence, and public participation on village funds management at Kecamatan Taman, Sidoarjo. The research applies quantitatively with primary data. Furthermore, the data collection technique used was purposive sampling. In line with that, 8 samples of villages from 98 village officers at Kecamatan Taman, Sidoarjo. Moreover, the data analysis technique used was multiple linear regression with SPSS (Statistical Package for Social Sciences) to examine the relationship between independent and dependent variables. The research shows that as follows: (1) transparency has a positive effect on village funds management, (2) accountability has a positive effect on village funds management, (3) competence has a positive effect on village funds management, and (4) public participation has a positive effect on village funds management. These findings identify that the better the level of transparency, accountability, competence, and public participation is, the more effective and accountable village funds management will be. Additionally, the study contributes to strengthening the literature on village financial governance in improving the quality of sustainable village funds management.

Keyword: transparency, accountability, competence, public participation, village funds management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling, dari metode tersebut diperoleh sampel sebanyak 8 desa dengan total populasi 98 data perangkat desa yang terdapat pada wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) untuk menguji hubungan antara variabel independent dan variabel dependent. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (2) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (3) kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (4) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini mengidentifikasi bahwa semakin baik tingkat transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan partisipasi masyarakat, maka semakin efektif dan akuntabel pula pengelolaan dana desa. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat literatur mengenai tata kelola keuangan desa serta menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, kompetensi, partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi, di mana kewenangan pemerintah pusat didistribusikan kepada pemerintah daerah hingga tingkat desa. Desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan administrasi publik (Nuradhawati, 2019). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu wujud implementasi kebijakan tersebut adalah alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dengan tujuan utama mendorong pembangunan desa, mengurangi kesenjangan antarwilayah, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siregar, 2020). Dengan demikian, dana desa diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat dan pemerataan ekonomi.

Meskipun kebijakan dana desa telah berjalan hampir satu dekade, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, lemahnya akuntabilitas aparat desa dalam pertanggungjawaban keuangan, kompetensi sumber daya manusia yang masih terbatas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan (Nugroho *et al.*, 2022). Fenomena ini dapat dilihat pada kasus di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, di mana ditemukan praktik penyalahgunaan aset desa, keterbatasan akses informasi publik, serta pungutan liar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan nominal mencapai Rp150.000 hingga Rp2.500.000 per bidang tanah. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Mardiasmo, 2018:48). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif tata kelola keuangan publik, keberhasilan pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan partisipasi masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat terkait penggunaan dana publik, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan (Renyowijoyo, 2013). Akuntabilitas menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, yang sekaligus memperkuat kepercayaan publik (Afni *et al.*, 2024). Kompetensi aparatur desa, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman, sangat penting agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa dapat berjalan efektif (Luqyana dan Islahuddin, 2022). Selain itu, partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat serta mengurangi potensi penyimpangan (Yanti *et al.*, 2023). Sinergi antara keempat aspek ini akan memperkuat tata kelola desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut: (1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?, (2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?, (3) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?, (4) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap pengelolaan dana desa, (4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

TINJAUAN TEORITIS

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan teori yang memandang aparatur atau manajer sebagai pihak yang dapat dipercaya (*steward*) untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan kesejahteraan principal, bukan untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan teori keagenan

yang menekankan adanya konflik kepentingan, teori ini berlandaskan pada prinsip psikologi dan sosiologi yang mengasumsikan bahwa seorang *steward* termotivasi oleh nilai kolektif, pencapaian tujuan organisasi, dan tanggung jawab moral terhadap pihak yang dilayani (Putri dan Maryono, 2022). Dalam konteks sektor publik, pemerintah desa sebagai *steward* memiliki amanah untuk mengelola dana desa secara efektif, transparan, dan akuntabel agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai *principal*. Dengan kata lain, teori ini menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan akuntabilitas aparat desa dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga (Aprisyah dan Yuliati, 2021).

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk setiap desa di Indonesia. Dana ini diberikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Tujuan utama dari dana desa adalah mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Melalui dana desa, pemerintah berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Besaran dana desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi geografis masing-masing desa. Dalam pengelolaannya, dana desa harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran, sehingga penggunaannya dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat desa.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas dana desa dalam satu periode anggaran (Nislandi dan Munari, 2023). Pengelolaan ini diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan harus berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disesuaikan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat oleh bendahara desa sebagai bagian dari penatausahaan keuangan. Kemudian, laporan realisasi penggunaan dana desa wajib disampaikan secara berkala kepada bupati/walikota dan diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan desa, serta mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan keuangan desa.

Transparansi

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dan kejujuran terhadap masyarakat, dengan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan (Nugroho *et al.* 2022). Arti transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat dalam dua hal, yakni sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya

peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (Widayanti *et al.*, 2019) Transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena merupakan bagian dari prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*). Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, menerangkan bahwa transparansi merupakan salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menerangkan bahwa transparansi adalah pemberian hak kepada masyarakat atas informasi keuangan yang terbuka dan jujur mengenai kegiatan operasional pemerintah desa terkait dengan penggunaan dana publik dan bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah desa, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hasil laporan pertanggungjawaban keuangan memiliki dampak signifikan dalam menentukan apakah kinerja pemerintah tersebut baik atau buruk. Menurut (Harjaningrum dan Ardini, 2021) akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang berhak dan memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dengan adanya Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kompetensi

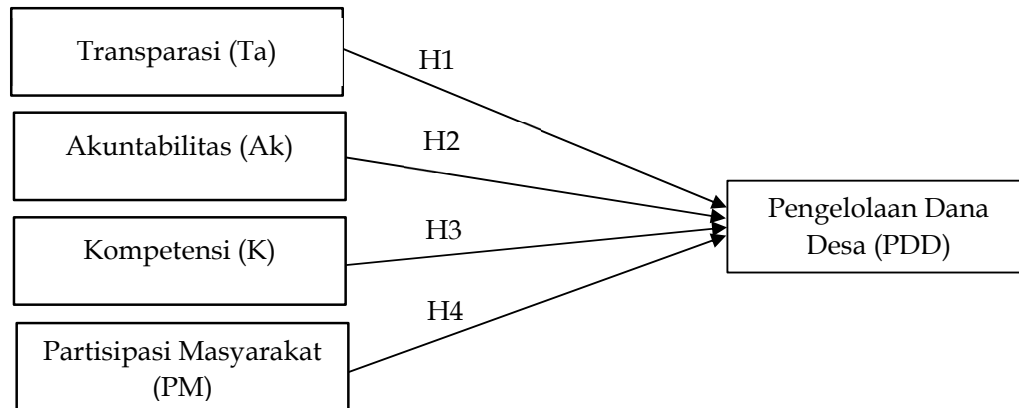
Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang dimiliki seseorang sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif (Luqyana dan Islahuddin, 2022). Dalam konteks pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur desa sangat penting karena mereka berperan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, administrasi, hingga pelaporan penggunaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi baik akan mampu menyusun perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat, mengelola anggaran secara tepat, serta membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, rendahnya kompetensi dapat menghambat jalannya pembangunan, menimbulkan kesalahan administrasi, bahkan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan menjadi kunci agar aparatur desa dapat bekerja lebih profesional, meminimalisir kesalahan, dan memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa (Putri dan Maryono, 2022). Partisipasi tidak hanya sebatas hadir dalam musyawarah desa, tetapi juga mencakup pemberian ide, masukan, kritik, hingga pengawasan langsung terhadap jalannya program yang dibiayai oleh dana desa. Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena mereka yang paling mengetahui kebutuhan dan prioritas pembangunan di lingkungannya, sehingga program yang direncanakan akan lebih tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan anggaran oleh aparatur desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat memperkuat transparansi

dan akuntabilitas pemerintah desa, sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya mendukung efektivitas pengelolaan dana desa, tetapi juga memperkuat prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik, diperlukan adanya keterbukaan, partisipasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dianggap suatu hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nislandi dan Munari (2023) menyatakan bahwa, adanya informasi pengelolaan dana desa yang transparan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana desa dikelola dengan baik sehingga akan mengurangi permasalahan informasi asimetri antara pihak pemerintah dan masyarakat. Semakin berkurang informasi asimetri maka kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari *steward* (aparatur desa) terhadap kinerja pemerintahan desa kepada pihak eksekutif diatasnya serta kepada *principal* (masyarakat desa). Oleh karena itu, jika masyarakat menilai bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan desa berjalan dengan baik, maka pengelolaan dana desa juga dianggap efektif dan optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti *et al.*, (2023) menyatakan bahwa, tingginya tingkat akuntabilitas mencerminkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan secara efektif dan optimal. Hal ini dikarenakan pemerintah yang memiliki tingkat akuntabilitas yang baik artinya pemerintah tersebut dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan

pengelolaan dana desanya, baik kepada peraturan dan yang telah ditetapkan, pemerintah pusat, maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi yang tinggi akan membantu aparatur desa dalam memahami prosedur pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan efektif, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah berupaya secara maksimal untuk membentuk aparatur yang memiliki motivasi dan kompetensi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) menyatakan bahwa, semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal ini dikarenakan pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, mempunyai keterampilan, dan sikap yang baik akan selalu bekerja dengan efektif, efisien dan produktif sehingga kinerja pengelolaan dana desa akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Putri dan Maryono (2022) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelestarian lingkungan. Partisipasi masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan ekonomis. Selain itu, masyarakat sebagai *principal* berhak untuk mengevaluasi, menilai, dan mengawasi pengelolaan dana agar terciptanya pengelolaan dana yang tertib. Sehingga, apabila desa menerapkan asas partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa dapat dikatakan optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2019) menyatakan bahwa, semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelia dan Rahayu (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena yang ada berdasarkan pada data-data yang bersifat kuantitatif berupa bilangan atau angka matematis dan dianalisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif menekankan kepada analisis menggunakan angka-angka kemudian direpresentasikan dengan kalimat berdasarkan hasil perhitungan dari angka tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian. Data primer tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022:130). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat Desa yang ada di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peneliti melakukan penelitian pada 8 Desa di Kecamatan Taman tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang memiliki karakteristik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Zulkifli *et al.*, 2021) Teknik *purposive sampling* merupakan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dilakukan. Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: (1) Responden yang telah memiliki Surat Keputusan (SK), (2) Responden yang memiliki pengalaman kerja di Kantor Desa kurang lebih 5 tahun, diasumsikan bahwa perangkat desa yang telah bekerja selama kurang lebih 5 tahun telah memiliki pengalaman dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Pada penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mendapatkan data dari variabel-variabel yang akan diteliti. Pengumpulan data didasarkan pada penyebaran kuesioner maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan terstruktur bersifat tertutup dengan jawaban yang telah disediakan dan diisi oleh responden dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia (Sugiyono, 2022:142). Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur indikator-indikator pada variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert yaitu alat atau cara untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2022:39) Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Pengelolaan Dana Desa merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Pengelolaan dana desa diharapkan mampu mendukung terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaan keuangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada hasil dan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengelolaan dana desa dalam penelitian ini diukur dengan indikator, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban.

Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2022:39) Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan dan dapat memiliki arah pengaruh positif maupun negatif pada variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi tersebut (Ifada dan Ardini, 2023). Dalam

penelitian ini, transparansi diukur dengan indikator, yaitu (1) Informatif, (2) Keterbukaan, (3) Pengungkapan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat atas proses pengelolaan keuangan desa terkait segala kegiatan operasional yang dilakukan pemerintah mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban (Ifada dan Ardini, 2023). Dalam penelitian ini, akuntabilitas diukur dengan indikator, yaitu (1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum, (2) Akuntabilitas Manajerial, (3) Akuntabilitas Program, (4) Akuntabilitas Kebijakan.

Kompetensi

Kompetensi pemerintah desa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dengan bekal pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman pada bidang tertentu (Savitri *et al.*, 2022). Dalam penelitian ini, kompetensi diukur dengan indikator, yaitu (1) Pengetahuan (*knowledge*), (2) Kemampuan (*skill*), (3) Sikap (*Attitude*).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemerintah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, selain itu hal ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan saran atau kritik kepada pemerintah desa dan sebagai bentuk pengawasan atas dana yang telah diberikan oleh pemerintah (Savitri *et al.*, 2023). Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat diukur dengan indikator, yaitu (1) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (2) Keterlibatan dalam penyusunan anggaran, (3) Keterlibatan dalam pelaksanaan anggaran.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19) Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atas sekelompok angka yang dapat diinterpretasikan dengan menggunakan rata-rata (*mean*), standar deviasi, *variance*, *maximum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Pengujian statistik ini bertujuan untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018:51), uji validitas merupakan pengujian yang dilakukan terhadap kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara mengukur valid atau tidaknya kuesioner tersebut. Uji validitas ini sangat penting dalam penelitian karena membantu memastikan bahwa alat pengukuran yang digunakan benar-benar mengukur konsep atau variabel yang dimaksud dengan cara yang tepat. Dasar analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian validitas yaitu, jika nilai $\text{sig} \leq 0,05$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid, sedangkan jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:195) Uji reliabilitas adalah suatu proses untuk mengevaluasi seberapa konsisten dan stabil suatu instrument pengukuran dalam menghasilkan hasil yang serupa jika diulang pada situasi atau waktu yang berbeda. Dalam istilah sederhana, reliabilitas mengukur sejauh mana alat atau metode pengukuran dapat diandalkan untuk memberikan

hasil yang konsisten. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik *alpha cronbach*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:145), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Data dikatakan normal apabila mempunyai tingkat signifikan lebih besar atau sama dengan nilai dari toleransi kesalahan yang ditentukan, sebesar 5% atau 0,05 dan sebaliknya jika nilai signifikan < dari 5% atau 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:107), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (*Varinace Inflation Factor*), yaitu dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:202), Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskesdastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan variabel independen (SREID) ditunjukkan dalam grafik *scatterplot* untuk menunjukkan uji heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan cara pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini: (a) Titik-titik residual tidak menyebar secara acak di sekitar garis horizontal (nol) maka terdapat heteroskedastisitas, (b) Titik residual menyebar acak dan merata di sekitar garis nol (tidak membentuk pola) maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018:95) Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang dirancang untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (*independent variabel*) yang jumlahnya lebih dari satu variabel terikat (*dependent variabel*). Teknik ini bertujuan untuk memodelkan dan mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen yang ada. Maka dari itu persamaan model penelitian analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$PDD = \alpha + \beta_1 Ta + \beta_2 Ak + \beta_3 K + \beta_4 PM + e$$

Keterangan:

PDD	: Pengelolaan Dana Desa
α	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien Regresi Ta, Ak, K, PM.
Ta	: Transparansi
Ak	: Akuntabilitas
K	: Kompetensi
PM	: Partisipasi Masyarakat
ε	: Tingkat kesalahan (<i>error</i>)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018:97), Koefisien determinasi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mempengaruhi atau menjelaskan variabilitas yang diamati pada variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi sendiri yaitu diantara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai R^2 mendekati 1 maka menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen semakin tinggi dan sebaliknya yaitu jika nilai R^2 mendekati 0 maka menunjukkan variabel independen ketidakmampuan dalam menjelaskan variabel dependen semakin tinggi.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2018:97), Uji F ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikannya, apabila nilai probabilitas signifikannya $< 0,05$ dan jika nilai F hitung $> F$ tabel maka H_0 ditolak dan variabel independen akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kemudian apabila nilai F hitung $< F$ tabel dan jika probabilitas signifikannya $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2018:98), Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: (a) Apabila nilai t signifikan menyatakan $t > 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, (b) Apabila nilai t signifikan menyatakan $t \leq 0,05$ maka H_0 diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN**Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan merangkum data secara ringkas. Dalam analisis ini mencakup ukuran pemusatan seperti *min* (nilai terendah), *max* (nilai tertinggi), *mean* (rata-rata), dan *standart deviation* (standar deviasi). Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviaton
Transparansi	98	18	30	26,16	2,791
Akuntabilitas	98	19	30	25,12	2,184
Kompetensi	98	17	30	26,48	2,894
Partisipasi Masyarakat	98	22	30	26,51	2,131
Pengelolaan Dana Desa	98	38	30	44,49	2,833
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Hasil Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian data hasil penelitian untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan setelah penelitian benar atau tidak. Ini dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur sebagai indikator yang diberikan dalam kuesioner (Ghozali, 2018:51).

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Transparansi

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Ta 1	0,576	0,000	Valid
Ta 2	0,604	0,000	Valid
Ta 3	0,666	0,000	Valid
Ta 4	0,608	0,000	Valid
Ta 5	0,740	0,000	Valid
Ta 6	0,438	0,000	Valid

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas tabel 2, dapat diketahui bahwa secara indikator untuk variabel transparansi dikatakan valid semua karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian untuk hasil uji validitas dari variabel akuntabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Ak 1	0,471	0,000	Valid
Ak 2	0,460	0,000	Valid
Ak 3	0,419	0,000	Valid
Ak 4	0,451	0,000	Valid
Ak 5	0,359	0,000	Valid
Ak 6	0,386	0,000	Valid

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas tabel 3, dapat diketahui bahwa secara indikator untuk variabel akuntabilitas dikatakan valid semua karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian untuk hasil uji validitas dari variabel kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Kompetensi

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
K 1	0,615	0,000	Valid
K 2	0,782	0,000	Valid
K 3	0,522	0,000	Valid
K 4	0,735	0,000	Valid
K 5	0,772	0,000	Valid
K 6	0,629	0,000	Valid

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas tabel 4, dapat diketahui bahwa secara indikator untuk variabel kompetensi dikatakan valid semua karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

Kemudian untuk hasil uji validitas dari variabel partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
PM 1	0,656	0,000	Valid
PM 2	0,628	0,000	Valid
PM 3	0,665	0,000	Valid
PM 4	0,193	0,000	Valid
PM 5	0,523	0,000	Valid
PM 6	0,301	0,003	Valid

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas tabel 5, dapat diketahui bahwa secara indikator untuk variabel partisipasi masyarakat dikatakan valid semua karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian untuk hasil uji validitas dari variabel pengelolaan dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Pengelolaan Dana Desa

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
PDD 1	0,487	0,000	Valid
PDD 2	0,464	0,000	Valid
PDD 3	0,615	0,000	Valid
PDD 4	0,546	0,000	Valid
PDD 5	0,642	0,000	Valid
PDD 6	0,419	0,000	Valid
PDD 7	0,468	0,000	Valid
PDD 8	0,292	0,000	Valid
PDD 9	0,226	0,000	Valid
PDD 10	0,188	0,000	Valid

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas tabel 6, dapat diketahui bahwa secara indikator untuk variabel pengelolaan dana desa dikatakan valid semua karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan apakah suatu instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten (Ghozali, 2018:195). Suatu item dikatakan reliabel ketika memiliki nilai koefisien (*cronbach's alpha*) sebesar $> 0,6$. Begitu sebaliknya, apabila suatu item memiliki *cronbach's alpha* $< 0,6$ maka dapat dikatakan item tersebut tidak reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

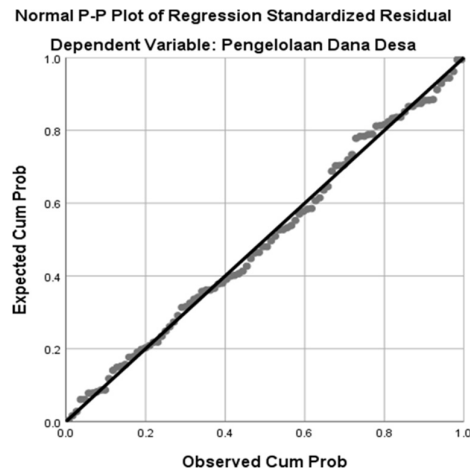
	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi (Ta)	0,652	Reliabel
Akuntabilitas (Ak)	0,636	Reliabel
Kompetensi (K)	0,761	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (PM)	0,838	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (PDD)	0,890	Reliabel

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa variabel transparansi memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,652, variabel akuntabilitas sebesar 0,636, variabel kompetensi sebesar 0,761, variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,838 dan variabel pengelolaan dana desa sebesar 0,890. Oleh karena itu, setiap variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar lebih dari 0,6.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji statistik non parametrik *one sample kolmogorov smirnov test*. Dasar keputusan dalam uji ini apabila nilai signifikansi 0,05 maka data dapat disimpulkan berdistribusi normal, sebaliknya apabila dalam uji ini nilai signifikansi < 0,05 maka data dapat disimpulkan tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji statistik non parametrik *one sample kolmogorov smirnov test*:



Gambar 2
Grafik Probability plot
 Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan hasil grafik pada gambar 2 menunjukkan bahwa penyebaran data mendekati garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal dan memenuhi asumsi uji normalitas. Berikut adalah hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk penelitian ini:

Tabel 8
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		98
Normal Parameters^{a,b}	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.00846787
Most Extreme Differences	<i>Absolute</i>	.059
	<i>Positive</i>	.039
	<i>Negative</i>	-.059
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp.Sig* pada hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* tersebut adalah sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10 maka data dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai *tolerance* ≤ 0,10

dan nilai VIF ≥ 10 maka data dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas data pada penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinearitas

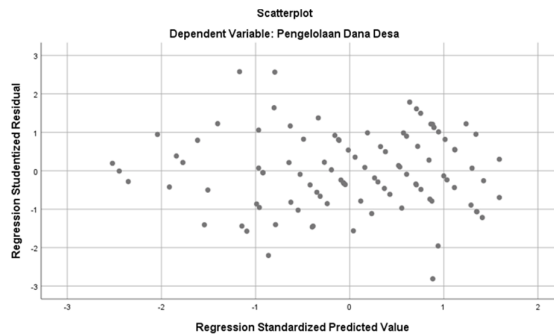
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Transparansi	.407	2.457
Akuntabilitas	.769	1.300
Kompetensi	.686	1.458
Partisipasi Masyarakat	.460	2.175

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 9 menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai *tolerance* 0,407 dan nilai VIF sebesar 2,457, selanjutnya, variabel akuntabilitas memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,769 dan nilai VIF sebesar 1,300, kemudian variabel kompetensi memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,686 dan nilai VIF sebesar 1,458 dan variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,460 dan nilai VIF sebesar 2,175. Dari hasil uji multikolinearitas tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3

Grafik Scatterplot

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan hasil grafik *scatterplot* pada gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel independen, apakah memiliki hubungan positif atau negatif. Berikut adalah hasil dari pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini:

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1. (constant)	11.090	1.603		6.916	.000

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Transparansi	.313	.059	.308	5.321	.000
Akuntabilitas	.138	.055	.106	2.530	.013
Kompetensi	.085	.044	.087	1.957	.033
Partisipasi Masyarakat	.906	.072	.681	12.516	.000

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel 10 diatas menunjukkan hasil uji regresi linier berganda yang menjelaskan ada atau tidaknya suatu hubungan antara variabel independen dan dependen. Maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$PDD = \alpha + \beta_1Ta + \beta_2Ak + \beta_3K + \beta_4PM + e$$

$$PDD = 11,090 + 0,313Ta + 0,138Ak + 0,085K + 0,906PM + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dapat menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai R² mendekati 0 atau lebih kecil dari 0 maka, variabel independen memiliki pengaruh yang kecil terhadap variabel dependen dan mengindikasi bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, Apabila nilai R² mendekati 1 maka, variabel independen memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen dan model regresi dianggap layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.934 ^a	.873	.868	1.02993

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square untuk model regresi dalam penelitian ini sebesar 0,873 atau 87,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pengaruh variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan partisipasi masyarakat dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya sebesar 12,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dalam penelitian memiliki hubungan linear atau mempengaruhi terhadap variabel dependen. Uji kelayakan model dengan uji F pada tingkat α sebesar 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka model penelitian yang digunakan tidak layak. Sebaliknya jika nilai signifikansi \leq 0,05 maka model penelitian yang digunakan layak. Hasil uji F dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	679.840	4	169.960	160.226	.000 ^b
Residual	98.650	93	1.061		
Total	778.490	97			

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan dari hasil uji F pada tabel 12, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000 maka dapat dikatakan variabel transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji t yaitu apabila nilai signifikansi menyatakan $t \leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang artinya hipotesis diterima. Sedangkan apabila nilai signifikansi menyatakan $t > 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yang artinya hipotesis ditolak. Hasil uji t dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 13
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1. (Constant)	11.090	1.603		6.916	.000
Transparansi	.313	.059	.308	5.321	.000
Akuntabilitas	.138	.055	.106	2.530	.013
Kompetensi	.085	.044	.087	1.957	.033
Partisipasi Masyarakat	.906	.072	.681	12.516	.000

Sumber: Tabulasi data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 13 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam tabel 13 menghasilkan nilai koefisien B sebesar 0,313 dan menunjukkan arah positif. Tingkat signifikansinya sebesar $0,000 \leq 0,05$ sehingga variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Maka hipotesis pertama dapat diterima. (2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam tabel 13 menghasilkan nilai koefisien B sebesar 0,138 dan menunjukkan arah positif. Tingkat signifikansinya $0,013 \leq 0,05$ sehingga variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Maka hipotesis kedua dapat diterima. (3) Pengaruh Kompetensi terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam tabel 13 menghasilkan nilai koefisien B sebesar 0,085 dan menunjukkan arah positif. Tingkat signifikansinya $0,033 \leq 0,05$ sehingga variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Maka hipotesis ketiga dapat diterima. (4) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam tabel 13 menghasilkan nilai koefisien B sebesar 0,906 dan menunjukkan arah positif. Tingkat signifikansinya $0,000 \leq 0,05$ sehingga variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Maka hipotesis keempat dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian pada uji statistik t menunjukkan bahwa variabel transparansi (Ta) memiliki nilai koefisien B sebesar 0,313 dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$. Dengan begitu, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa H_1 diterima, yang mengartikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Taman. Hal ini terlihat dari adanya papan informasi atau spanduk pengumuman yang memuat jumlah pendapatan yang diterima dari pemerintah serta rincian kegiatan terkait penggunaan dana desa tahun 2024, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi keuangan mengenai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya publik. Usulan masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah yang melibatkan berbagai masyarakat

juga diperhatikan dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa. Artinya semakin baik variabel Transparansi maka semakin tinggi variabel pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Taman. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah variabel Transparansi maka akan mempengaruhi rendahnya Pengelolaan dana desa, sehingga mempengaruhi Transparansi dalam menjalankan program dana desa di Desa Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianti dan Sari, 2024), (Firdaus *et al.*, 2020) dan (Ate *et al.*, 2023) yang menyimpulkan bahwa publikasi informasi mengenai dana desa dan kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa merupakan bentuk transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini juga berfungsi sebagai pemenuhan hak-hak publik untuk mengetahui penggunaan sumber daya publik yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian pada uji statistik t menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (Ak) memiliki nilai koefisien B sebesar 0,138 dan memiliki signifikansi sebesar $0,013 \leq 0,05$. Dengan begitu, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa H_2 diterima, yang mengartikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Taman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari kepatuhan dalam menyusun laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas ini diwujudkan oleh pemerintah desa melalui pemasangan papan informasi atau spanduk pengumuman yang memuat laporan keuangan desa untuk satu periode pemerintahan di Balai Desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan desa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Artinya dalam penelitian ini akuntabilitas sangat penting untuk diterapkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Garung dan Ga, 2020), (Firdaus *et al.*, 2020) dan (Dewi *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan pelaporan tepat waktu merupakan bukti nyata dari tanggung jawab pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pengelolaan yang baik. Pengaruh positif akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa menjelaskan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan pengelolaan dana desa yang semakin baik.

Pengaruh Kompetensi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian pada uji statistik t menunjukkan bahwa variabel Kompetensi (K) memiliki nilai koefisien B sebesar 0,085 dan memiliki signifikansi sebesar $0,033 \leq 0,05$. Dengan begitu, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa H_3 diterima, yang mengartikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Taman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki kemampuan untuk menyajikan laporan dengan baik, memahami sistem akuntansi pemerintah, memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat meningkatkan pelatihan. Selain itu, perangkat desa saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan mampu menyajikan laporan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship*, di mana perangkat desa (*steward*) yang berfungsi sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*principals*) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehingga dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan keuangan desa, perangkat desa dapat menghasilkan keputusan yang optimal

untuk memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan tugas yang diharapkan. Dengan demikian, teori *stewardship* telah terwujud, dimana kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dapat terlihat dengan jelas. Semakin tinggi tingkat kompetensi perangkat desa maka semakin optimal kinerja dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri dan Maryono, 2022), (Aryani *et al.*, 2020) dan (Masruhin dan Kaukab, 2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur desa maka pengelolaan dana desa juga semakin akuntabel. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan tugas yang diemban, akan mendorong pegawai untuk bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Pegawai yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal, sehingga kinerja pengelolaan keuangan desa dapat meningkat.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian pada uji statistik t menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (PM) memiliki nilai koefisien B sebesar 0,906 dan memiliki signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$. Dengan begitu, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa H_4 diterima, yang mengartikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Taman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan intensitas partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, masyarakat perlu aktif meminta pertanggungjawaban dari pemerintah agar pelaksanaan desentralisasi dapat berlangsung dengan lebih akuntabel. Temuan ini didukung oleh data yang menunjukkan sebagian besar perangkat desa di Kecamatan Taman menyatakan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, berpartisipasi langsung dalam rapat, melakukan pengawasan, memberikan penilaian, serta memberikan penghargaan. Sehingga pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Berdasarkan teori *stewardship*, perangkat desa diberikan kepercayaan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini, masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap perangkat desa, serta meyakini bahwa mereka akan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan mengutamakan tujuan organisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori *stewardship* telah terpenuhi dalam pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, maka semakin kuat rasa tanggung jawab kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yanti *et al.*, 2023), (Putri dan Maryono, 2022), dan (Masruhin dan Kaukab, 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini juga sesuai dengan tujuan utama dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan mendorong terjalinnya hubungan yang positif antara masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa akan lebih sering berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dengan sebagai berikut: (1) Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena sikap terbuka yang ditunjukkan oleh pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi terkait pengelolaan keuangan desa serta informasi lainnya. Dengan memberikan akses yang memadai, pemerintah desa dapat memastikan bahwa penggunaan dana desa memberikan

manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya, (2) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena adanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana desa, yang mencerminkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan peraturan yang ditetapkan. Sehingga program kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat, (3) Kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa berperan penting dalam penyelesaian tanggung jawab mereka. Sehingga, semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur desa, maka semakin baik pula pengelolaan dana desa yang dilakukan, (4) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hasil yang diperoleh akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga program yang dilaksanakan menjadi relevan dan efektif.

Keterbatasan

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, antara lain: (1) pengambilan sampel yang hanya mencakup 8 desa dari total 24 desa yang ada di Kecamatan Taman, sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasikan, (2) Penelitian ini hanya melibatkan perangkat desa sebagai responden, sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak mencerminkan pandangan atau pengalaman nyata masyarakat desa.

Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, antara lain: (1) Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan mencakup seluruh desa di Kecamatan Taman, sehingga informasi yang diperoleh lebih komprehensif dan memperkuat hasil penelitian, (2) Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan populasi lain agar hasil yang diperoleh menjadi lebih valid dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N., M. Su'un, dan A. Selong. 2024. *Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*. 7(1), 397-408.
- Andriani, M. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)*. 1-13.
- Angelia, R. S. dan S. Rahayu. 2020. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019)*. *E-Proceeding of Management*, 7(1), 1008-1014. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/managemen/article/view/11589>
- Aprisyah, P. dan A. Yuliati. 2021. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu)*. *Jimea*, Vol. 5(No. 2), 1855-1869.
- Aryani, N. P. D. E., Dr. D. N. S. Werastuti, dan I. M. P. Adiputra. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)* 11(2):178-190.
- Ate, J. H., Ratnawati, dan M. T. N. Rokhman. 2023. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas

- Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4(1):20–25. doi: 10.24036/jea.v6i1.1114.
- Dewi, C. K., Ikbal A, M., dan F. Moh. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol The. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Dewi, M. H. U., C. Fandeli. dan M. Baiquni. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Firdaus, A., Suharno. dan Sunarti. 2020. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 291–300. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3692>
- Fitrianti, M. dan V. F. Sari. 2024. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Prinsip GoodGovernance." 6(1):206–218.
- Garung, C. Y. dan L. L. Ga. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi ke-9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Harjaningrum, E. A. dan L. Ardini. 2021. "Analisis Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10(1):1–25.
- Ifada, B. I. dan L. Ardini. 2023. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 1–23.
- Luqyana. dan Islahuddin. 2022. *Pengelolaan Keuangan Internal, Daerah : Apakah*. 7(1), 83–94.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Andi.
- Masruhin, A. dan M. E. Kaukab. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Nislandi, N. A. dan Munari. 2023. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Nugroho, P. S., P. Wahyuningsih. dan S. Alliyah. 2022. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–19.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Lembaran Salinan Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- _____. *Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara*.
- Putri, A. R. L. dan Maryono. 2022. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

- Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668-1688.
- Renyowijoyo, M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Savitri, E., Andreas, V. Diyanto, dan T. A. Gumanti. 2022. "Accountability of Village Fund Management in Riau Province." *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 14(2). doi: 10.23969/jrak.v14i2.5550.
- Siregar, M. 2020. Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3-15.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587. Jakarta.
- _____. Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495. Jakarta.
- Widayanti, W., M. P. Priyadi. dan L. Ardini. 2019. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus Pada Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur)." *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 22(2):135-56. doi: 10.35591/wahana.v22i2.170.
- Yanti, E. R., Wiralestari. dan W. Tiswiyanti. 2023. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(01), 53-64.
- Zulkifli., Sandrayati. dan N. Ariani. 2021. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 26-38. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>